

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Data Penelitian

1. Profil Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari

Berikut merupakan profil Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang informasinya mudah didapat pada *website* resminya syariah.iain-antasari.ac.id/ .

a. Sejarah Berdiri

Cikal bakal Fakultas Syariah diawali pada tahun 1958, ketika di Banjarmasin berdiri Fakultas Agama Islam di bawah Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang resmi berdiri pada tanggal 21 September 1958. Ketuanya dijabat oleh H. Abdurrahman Ismail, MA dan H. Mastur Jahri, MA sebagai sekretaris. Setahun kemudian, pada tahun 1959, Fakultas Agama Islam ini berubah menjadi Fakultas Islamologi dan masih tetap di bawah Unlam. Pada tahun 1960 dibentuk Panitia Persiapan Fakultas Syariah Banjarmasin yang diketuai oleh K.H. Abdurrahman Ismail, MA. Sebagai upaya untuk penegerian Fakultas Islamologi Unlam menjadi Fakultas Syariah, Panitia Persiapan Fakultas Syariah Banjarmasin mengutus H.M. Daud Yahya dan Abdurrivai, BA untuk menghadap Menteri Agama K.H.M. Wahib Wahab di Jakarta guna memantapkan usaha yang sedang ditempuh.

Usaha delegasi Panitia Persiapan Fakultas Syariah ini tidak sia-sia, karena dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun

1960 tanggal 24 November 1960 yang ditandatangani sendiri oleh K.H.M. Wahib Wahab diresmikanlah penegerian Fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syariah Al-Jamiah Al-Islamiyah al-Hukumiyah Yogyakarta Cabang Banjarmasin. Penegerian Fakultas Syariah ini terhitung mulai tanggal 15 Januari 1961 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 H. Sebagai Dekannya ditetapkan KH. Abdurrahman Ismail, MA.

Walaupun Fakultas Islamologi Banjarmasin telah dinegerikan menjadi Fakultas Syariah Al-Jamiah Al-Islamiyah al-Hukumiyah Yogyakarta Cabang Banjarmasin, keinginan masyarakat Kalimantan Selatan untuk memiliki sebuah perguruan tinggi agama Islam di daerah ini dirasakan belum belum sepenuhnya terpenuhi. Pada tanggal 20 September 1961 didirikan sebuah Universitas Islam Antasari (Unisan) yang merupakan gabungan Fakultas Ushuluddin di Amuntai, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas Syariah di Kandangan dan pada Tahun 1962 ditambah fakultas baru, yaitu Fakultas Publisistik di Banjarmasin. Pengumuman berdirinya Unisan dibacakan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Maksid, pada tanggal 17 Mei 1962 di lapangan Dwiwarna Barabai pada peringatan Hari Proklamasi ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan ke-13.

Adanya Fakultas Syariah Al-Jamiah Al-Islamiyah al-Hukumiyah Yogyakarta Cabang Banjarmasin dan berdirinya Unisan sebagai modal utama untuk mendirikan IAIN Antasari. Melalui proses perjuangan panjang dan berbagai pendekatan dengan Pemerintah Pusat, maka pada tanggal 20 November 1964 berdasar pada Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun

1964 diresmikanlah Pembukaan IAIN Al Jam'iah Antasari yang berkedudukan di Banjarmasin dengan Rektor pertama H. Jafry Zamzam dengan sekaligus menetapkan pimpinan-pimpinan fakultasnya masing-masing, yaitu: H. Abdurrahman Ismail sebagai Fakultas Syariah Banjarmasin, H. Usman sebagai Dekan Fakultas Syariah Kandangan, H.M. As'ad Fakultas Tarbiyah Barabai, dan H. Abdul Wahab Sya'rani sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Amuntai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1964 ini berarti Fakultas Syariah IAIN Al Jam'iah Antasari mempunyai dua cabang, yaitu Fakultas Syariah Banjarmasin dan Fakultas Syariah Kandangan. Fakultas Syariah yang berada di Banjarmasin sejak tahun 1961 sampai tahun 1965 menempati Kantor di Jalan Lambung Mangkurat bersama bersama tiga fakultas lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat. Proses perkuliahan menggunakan gedung bekas Kodam X Lambung Mangkurat di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada Tahun 1965, kantor Fakultas Syariah dan sebagian perkuliahan dipindahkan ke gedung Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) di Jalan Sungai Mesa Darat. SMIA dimaksud kemudian menjadi Sekolah Persiapan IAIN dan terakhir menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin. Sebagai lembaga pendidikan yang masih muda, kelengkapan sumber daya manusia masih dirasakan sebagai masalah.

Fakultas Syariah Kandangan berdiri bertepatan dengan diresmikannya IAIN Al Jam'iah Antasari. Karena statusnya sebagai

perguruan tinggi Islam negeri, sebagian besar mahasiswa Fakultas Adab (semula bernama Akademi Agama Islam dan Bahasa Arab) Kandangan pindah ke Fakultas Syariah Kandangan. Sejak berdiri sampai integrasi pada tahun 1978, Fakultas Syariah IAIN Al Jam'iah Antasari Kandangan hanya menyelenggarakan program Sarjana Muda. Mahasiswa yang ingin melanjutkan program sarjana lengkap kebanyakan melanjutkan ke Fakultas Syariah IAIN Al Jam'iah Antasari Banjarmasin.

Perlu dijelaskan bahwa sewaktu Fakultas Syariah Kandangan dinegerikan yang diangkat hanya dekan yang akan memimpin. Dekan yang ditunjuk saat itu adalah KH. Usman (Lahir di Amuntai tahun 1911 dan meninggal pada usia 74 tahun di Kandangan tahun 1985), Mufti Kandangan. Sama sekali belum ada pengangkatan dosen-dosen tetap. Pegawai administrasi pun merupakan tenaga honorer. Hanya ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kandangan. Menurut penjelasan salah seorang pegawai Fakultas Syariah Kandangan, Murniansyah, bahwa kelangsungan perkuliahan, baik untuk gaji dosen dan karyawan, maupun untuk pembangunan fisik lebih banyak mengandalkan bantuan/donasi dari masyarakat yang peduli dengan kelangsungan pendidikan agama Islam dan bantuan pemerintah daerah setempat, selain Sumbangan Pendidikan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa.

Pada tahun 1978 dilakukan integrasi konsentrasi kegiatan akademik Fakultas Syariah Kandangan ke Fakultas Syariah Banjarmasin. Sebagian dosen dan karyawan sebagian ikut pindah ke Banjarmasin dan sebagian

pegawai pemda kembali ke instansinya. Barang-barang inventaris/aset, termasuk buku-buku perpustakaan sumbangan masyarakat, mahasiswa, dan para jemaah haji, sebanyak 2 truk turut diangkut ke Banjarmasin. Pegawai yang ditugaskan untuk membawa barang inventaris/aset tersebut adalah Bapak Murniansyah. Akan tetapi, sangat disayangkan data-data penting tertulis mengenai jumlah dosen, mahasiswa, dan alumni Fakultas Syariah Kandungan tidak ditemukan lagi kecuali mengandalkan ingatan para pegawainya.

Setelah Kantor Pusat dan seluruh kegiatan perkuliahan dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin, begitu juga fakultas-fakultas yang berada di daerah, termasuk Syariah Kandungan, diintegrasikan ke Banjarmasin, maka gedung-gedung dikembalikan kepada Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat.

Dari perjalanan sejarah IAIN Antasari kelihatan bahwa Fakultas Syariah adalah fakultas yang paling awal berdiri di daerah ini. Fakultas inilah yang menjadi modal di kemudian hari untuk berdirinya IAIN Antasari di samping fakultas-fakultas swasta yang ada di daerah.

b. Perkembangan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama, setiap fakultas di lingkungan IAIN dapat membuka prodi. Akan tetapi, dengan beberapa pertimbangan, fakultas-fakultas di lingkungan IAIN Antasari hanya membuka beberapa prodi sesuai dengan keperluan, dan prodi itu pada umumnya ada pada

Program Sarjana, kecuali pada Fakultas Tarbiyah sudah ada sejak program Sarjana Muda.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam beberapa nama prodi mengalami perubahan, yaitu: Jurusan/Prodi Perbandingan Hukum dan Mazhab berubah menjadi Perbandingan Mazhab, Siyasah Jinayah menjadi Hukum Tata Negara (Siyasah), Muamalat menjadi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ekonomi Islam menjadi Ekonomi Syariah, dan Ahwal al-Sakhsiyah menjadi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

Seiring dengan dinamika dan perkembangan beberapa jurusan/prodi di Fakultas Syariah dengan berdirinya jurusan/prodi yang baru, tidak hanya di bidang hukum Islam, tetapi juga jurusan dan prodi di bidang ekonomi Islam, maka pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari, yang isinya antara lain mengubah nama Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Pada penerimaan mahasiswa baru IAIN Antasari tahun akademik 2014/2015 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam telah membuka jurusan baru, yaitu Jurusan Asuransi Syariah. Penyelenggaraan jurusan ini berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2337 Tahun 2014.

Sejak berdirinya, banyak pembenahan telah dilakukan terhadap jurusan/program studi pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, mulai dari

kurikulum (*software*), sarana dan prasarana belajar (*hardware*), penambahan tenaga SDM berupa dosen dan sumber daya manusia pendukung lainnya (*brainware*).

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam umumnya berasal dari latar belakang pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sebagian besar mahasiswa berasal dari Kalimantan Selatan dan lainnya berasal dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan luar Kalimantan. Secara ekonomi, berasal dari golongan ekonomi beragam: menengah ke atas, menengah, dan menengah ke bawah. Pekerjaan orang tua mereka adalah wiraswasta, pegawai negeri sipil, petani, dan lain-lain.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam merancang strategi pengembangan berkelanjutan selama lima tahun (2014-2019) agar fakultas ini terus berkembang secara berkesinambungan. Strategi pengembangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini tetap memperhatikan hasil analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) yang dihadapi, yaitu dengan mengoptimalkan faktor-faktor kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Kelemahan tersebut diubah menjadi tantangan agar dapat merebut peluang yang ada dan meminimalisir kekurangan yang dihadapi. Hal tersebut harus terus menerus dilakukan melalui kerja sama yang sinergis antara pimpinan, dosen, staf administrasi, dan mahasiswa demi peningkatan kualitas pengajaran dan mutu lulusan ke depan.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam didukung 81 orang dosen berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hampir seluruhnya bersertifikat pendidik profesional, terdiri dari 4 orang dosen bergelar profesor doktor, 10 orang dosen bergelar doktor, 6 orang dosen sedang merampungkan program doktor, 59 orang dosen bergelar magister, 2 orang masih melanjutkan pendidikan S.2, dan 14 orang dosen tidak tetap. Selain itu juga didukung tenaga administrasi sebanyak 8 orang yang berstatus PNS dan 8 orang lagi sebagai tenaga honorer.

Untuk menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam saat ini sudah memiliki sarana yang cukup memadai untuk pembelajaran dan terus mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang telah dimiliki.

c. Visi dan Misi

Untuk menyatukan langkah dalam membangun pencapaian tujuan pendidikan yang dicita-citakan maka visi, misi, tujuan, dan sasaran unit pengelola Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari dirumuskan secara partisipatif antar-Tim Penyusun Visi dan Misi pada tingkat fakultas dengan melibatkan semua pihak, seperti pimpinan fakultas, para alumni yang mengabdikan pada berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, para ahli, pakar serta *stake holders* yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan ekonomi Islam.

Adapun mekanisme penyusunan visi misi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan fakultas melakukan evaluasi terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi atas dasar ketercapaian dan kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi/jurusan dan kebutuhan pasar;
- 2) Membentuk tim penyusun visi misi fakultas melalui Surat Keputusan Dekan;
- 3) Tim penyusun visi dan misi bertugas mengevaluasi yang tertuang dalam buku pedoman dan rencana strategi (renstra) fakultas;
- 4) Pengumpulan data melalui pelacakan alumni dan pengguna alumni untuk mengetahui kebutuhan pasar serta melakukan konsultasi dengan para pakar atau ahli serta *stake holders* yang kompeten sebagai sumber bahan masukan dan pertimbangan penyusunan *draft* awal visi dan misi fakultas;
- 5) Menyusun *draft* awal visi dan misi fakultas berdasarkan visi dan misi IAIN Antasari serta mempertimbangkan masukan dan saran dari pelacakan alumni, pengguna alumni serta para pakar atau para ahli;
- 6) Menyelenggarakan pembahasan visi dan misi fakultas pada *workshop* pengembangan kurikulum dengan melibatkan unsur-unsur seperti para dosen dan karyawan fakultas, alumni, pengguna alumni, dan para pakar yang menghasilkan rekomendasi.
- 7) *Draf* yang telah disetujui dalam kegiatan *workshop* direkomendasikan kepada fakultas untuk disahkan melalui Surat Keputusan Dekan;

- 8) Sosialisasi visi dan misi, tujuan dan sasaran Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari kepada civitas akademika, alumni dan pengguna alumni.

Visi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah berhasil dirumuskan adalah “Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Kesyarifan yang Unggul dan Berkarakter”.

Misi dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin di antaranya adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas penyusunan dan perumusan konsep kebijaksanaan dan perencanaan program fakultas untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi fakultas.
- 2) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
- 3) Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
- 4) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan.
- 6) Melaksanakan pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan.
- 7) Melaksanakan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain.
- 8) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan fakultas
- 9) Menyelenggarakan administrasi fakultas.

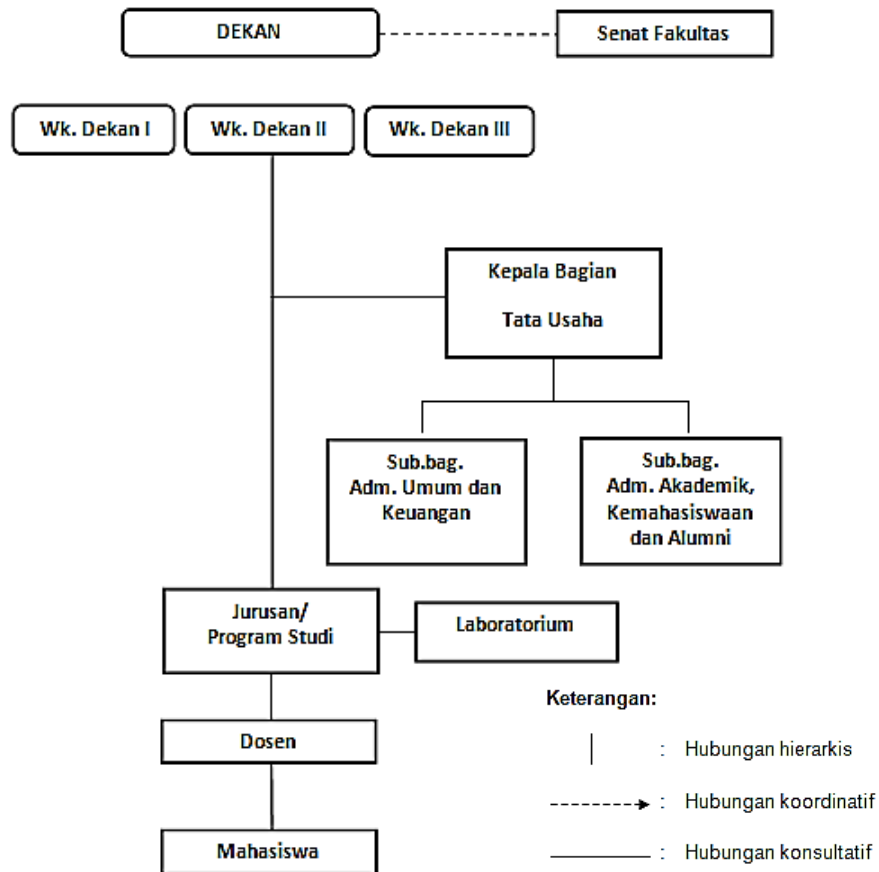
10) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Untuk mendukung visi dan misi Program Studi, maka dilakukan upaya-upaya peningkatan. Peningkatan dilakukan melalui penyelenggaraan-penyelenggaraan pembelajaran yang kondusif, aktual dan kontemporer, penyediaan sumber belajar dan penggunaan teknologi mutakhir dalam media pengajarannya, penyelenggaraan pelayanan berkualitas dan pelayanan prima. Untuk mencapai sasaran menjadi profesi yang dikehendaki dari profil lulusan melalui peningkatan kompetensi yang mencakup kompetensi akademik, kepribadian dan keterampilan

Kurikulum yang dibuat pun telah mengejawantahkan visi dan misi tersebut. Bahkan kurikulum senantiasa terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan lingkungan dan dinamika yang ada pada *users/stake holders*. Sejak dibuka pada tahun 1968 hingga sekarang tahun 2014, sudah sering dilakukan penggantian kurikulum. Saat ini ada dua kurikulum yang diterapkan, yakni Kurikulum 2010 dan Kurikulum 2013 yang berlaku efektif bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2013/2014, sedangkan mahasiswa lama, yaitu tahun masuk 2012, 2011, 2010 tetap menggunakan kurikulum tahun 2010. Hasil yang diharapkan dari kurikulum tersebut adalah terwujudnya tujuan dan sasaran fakultas.

d. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi FSEI IAIN Antasari



Sumber data : syariah.iain-antasari.ac.id/struktur-organisasi/

2. Karakteristik Responden

Hasil kuesioner yang berhasil diraih adalah 46 dari 58 orang populasi. Adapun karakteristik responden jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lama pemakaian adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	29	63,04%
2	Perempuan	17	36,96%
	Total	46	100%

Sumber: Hasil penelitian 2016 (Data Diolah)

Data yang diperoleh melalui penyebaran angket memperlihatkan bahwa proporsi terbesar dari responden melalui jenis kelamin adalah Laki-laki sebanyak 29 orang (63,04%). Sedangkan perempuan yaitu sebanyak 17 orang (36,96%) dari total responden.

b. Jenis Usia Responden

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	<30	7	15,22%
2	30-40	19	41,30%
3	40<	19	41,30%
4	Tidak Memberi Tahu	1	2,17%
	Total	46	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2016 (Data Diolah)

Dari data di atas berdasarkan jenis Usia diperoleh di bawah 30 tahun sebanyak 7 orang (15,22%), usia 30 hingga 40 tahun sebanyak 19 orang (41,30%), usia lebih 40 tahun dari 19 orang (41,30%) dari total responden dan yang tidak memberi tahun sebanyak 1 orang (2,17%).

c. Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S2	40	86,96%
2	S3	6	13,4%
	Total	46	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2016 (Data Diolah)

Dari data di atas berdasarkan tingkat pendidikan diperoleh berpendidikan hingga S2 sebanyak 40 orang (87%) dan berpendidikan hingga S3 sebanyak 6 orang (13%).

d. Riwayat Pendidikan Formal

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Pendidikan Formal

No	Adanya Riwayat Berpendidikan Formal	Frekuensi	Persentase
1	Agama tanpa IPS	24	52,17%
2	IPS tanpa Agama	6	13,4%
3	Agama dan IPS	15	32,61%
4	Tidak Keduanya	1	2,17%
	Total	46	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2016 (Data Diolah)

Dari data di atas berdasarkan riwayat berpendidikan formal diperoleh Agama tanpa IPS secara formal sebanyak 24 orang (52,17%), IPS tanpa Agama sebanyak 6 orang (13,4%), IPS dan Agama sebanyak 15 orang (32,61%) dan tidak memiliki keduanya sebanyak 1 orang (2,17%).

e. Tugas Mengajar

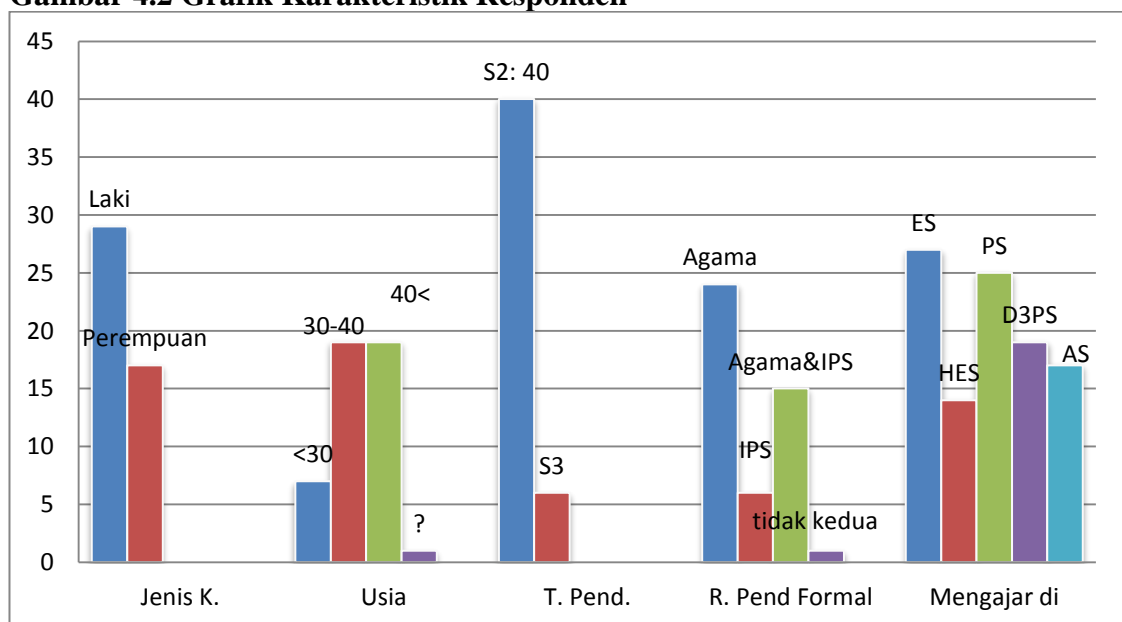
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tugas Mengajar

No	Prodi	Frekuensi (beririsan)	Persentase
1	Ekonomi Syariah	27	58,70%
2	Hukum Ekonomi Syariah	14	30,43%
3	Perbankan Syariah	25	54,35%
4	D3 Perbankan Syariah	19	21,74%
5	Asuransi Syariah	17	36,96%

Sumber: Hasil Penelitian 2016 (Data Diolah)

Data di atas berisi variabel yang saling beririsan karena responden dapat memilih lebih dari satu sehingga frekuensi tersebut tidak dikumulatikan. Berdasarkan tugas mengajar diperoleh Ekonomi Syariah sebanyak 27 orang (58,7%), Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 14 orang (30,43%), Perbankan Syariah sebanyak 25 orang (54,35%), D3 Perbankan Syariah sebanyak 19 orang (21,74%) dan Asuransi Syariah sebanyak 17 orang (36,96%).

Gambar 4.2 Grafik Karakteristik Responden



Sumber: Hasil Penelitian 2016 (Data diolah)

3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dukungan

a. Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah skor indikator dengan skor total. Valid tidaknya butir item pertanyaan variabel dapat dilihat dengan mengkonsultasikan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dari tabel r (dapat dilihat di lampiran), untuk $df = n - 2$, atau dalam penelitian ini $df = 46 - 2 = 44$ dengan tingkat signifikan 10%, diperoleh angka $r_{tabel} = 0,2455$.

Berikut ini hasil uji validitas penelitian dengan menggunakan IBM SPSS STATISTIC 22 pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas1 Item Dukungan I

Item Pertanyaan	r_{hitung}	$r_{tabel (0,05)}$	Keterangan
Ekonomi Islam	0,915	0,2455	Valid
Keadilan	0,933	0,2455	Valid
Keteraturan	0,899	0,2455	Valid
Realisasi	0,888	0,2455	Valid

Sumber: hasil penelitian 2016 (Data diolah)

Dari hasil uji validitas di atas bahwa semua rangka r_{hitung} berada di atas r_{tabel} yaitu 0,2455 yang menunjukkan bahwa semua butir item valid dengan tingkat kepercayaan 95%.

b. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas pada masing-masing variabel diperoleh dengan membandingkan nilai r_{alpha} dengan r_{tabel} , apabila $r_{alpha} > r_{tabel}$, maka dikatakan reliabel. Dalam hal ini taraf signifikasinya 10% dengan $n = 46$ sehingga $df = n - 2$, $df = 46 - 2 = 44$ maka didapat $r_{tabel} = 0,2455$.

Berikut hasil uji realibilitas penelitian ini dengan menggunakan IBM SPSS STATISTIC 22 pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas Instrumen Data

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,929	4

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Ekonomi				
Islam	12,87	6,116	,841	,906
Keadilan	13,02	6,200	,878	,894
Keteraturan	13,22	6,352	,817	,914
Realisasi	13,26	6,686	,806	,918

Sumber: hasil penelitian 2016 (data diolah)

Dari uji realibilitas di atas dapat diketahui bahwa semua angka *r alpha cronbach* adalah 0,929 yang artinya $r_{\alpha} > r_{\text{tabel}}$; $0,929 > 0,2455$ yang menunjukkan semua reliabel.

c. Item Pertanyaan Dukungan Dimensi Ekonomi Islam;

Berikut hasil angket dari pertanyaan “Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi terbaik yang pernah ada”:

Tabel 4.8 Hasil Angket Item Dukungan Dimensi Ekonomi Islam

Y.1	Jlh	%	Jenis Kelamin				Usia								Tingkat Pendidikan			
			Lk	%	Pr	%	<30	%	30-40	%	40<	%	?	%	s2	%	s3	%
STS	2	4,35	2	7	0	0	0	0	1	5	1	5	0	0	1	3	1	17
TS	1	2,17	1	3	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	3	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	8	17,39	5	17	3	18	1	14	5	26	1	5	1	100	8	20	0	0
SS	35	76,09	21	72	14	82	6	86	13	68	16	84	0	0	30	75	5	83
Total	46	100	29	100	17	100	7	100	19	100	19	100	1	100	40	100	6	100
Total	46	100	46				46								46			
Y.1	Mengajar di prodi										Riwayat Pendidikan Formal							
	ES	%	HES	%	PS	%	D3PS	%	AS	%	Agama	%	IPS	%	IPS& Agama	%	Tidak Keduanya	%
STS	1	4	0	0	0	0	0	0	1	6	1	4	0	0	1	7	0	0
TS	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	4	15	4	29	5	20	2	20	4	24	3	13	3	50	1	7	1	100
SS	22	81	10	71	20	80	7	70	12	71	19	79	3	50	13	87	0	0
Total	27	100	14	100	25	100	10	100	17	100	24	100	6	100	15	100	1	100
Total															46			

Data: Hasil Penelitian, 2016 (Data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS) berjumlah 2 orang atau 4,35%. Jumlah responden yang menjawab tidak setuju (TS) berjumlah 1 orang atau 2,17%. Tidak ada responden yang Abstain (A). Jumlah responden yang menjawab setuju (S) berjumlah 8 orang atau 17,39%. Dan Jumlah responden yang menjawab sangat setuju (SS) berjumlah 35 orang atau 76,09%.

d. Item Pertanyaan Dukungan Dimensi Keadilan;

Berikut hasil angket dari pertanyaan “keuangan publik Islam adil dalam menjadi aturan publik meskipun publik memiliki unsur masyarakat yang heterogen/majemuk/plural.”

Tabel 4.9 Hasil Angket Item Dukungan Dimensi Keadilan

Y.2	Jlh	%	Jenis Kelamin				Usia								Tingkat Pendidikan			
			Lk	%	Pr	%	<30	%	30-40	%	40<	%	?	%	s2	%	s3	%
STS	2	4,35	2	7	0	0	0	0	1	5	1	5	0	0	1	3	1	17
TS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1	2,17	1	3	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
S	16	34,78	7	24	9	53	1	14	7	37	7	37	1	100	16	40	0	0
SS	27	58,7	19	66	8	47	5	71	11	58	11	58	0	0	22	55	5	83
Total	46	100	29	100	17	100	7	100	19	100	19	100	1	100	40	100	6	100
Total	46	100	46				46								46			
Y.1	Mengajar di prodi										Riwayat Pendidikan Formal							
	ES	%	HES	%	PS	%	D3PS	%	AS	%	Agama	%	IPS	%	IPS& Agama	%	Tidak Keduanya	%
STS	1	4	0	0	0	0	0	0	1	6	1	4	0	0	1	7	0	0
TS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
S	9	33	6	43	9	36	6	60	8	47	10	42	3	50	3	20	0	0
SS	17	63	8	57	15	60	4	40	8	47	13	54	3	50	11	73	0	0
Total	27	100	14	100	25	100	10	100	17	100	24	100	6	100	15	100	1	100
Total											46							

Sumber Data: Hasil Penelitian, 2016 (Data Diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS) berjumlah 2 orang atau 4,35%. Tidak ada responden yang menjawab tidak setuju (TS). Jumlah responden yang Abstain (A) berjumlah 1 orang atau 2,17%. Jumlah responden yang menjawab setuju (S) berjumlah 16 orang atau 34,78%. Dan Jumlah responden yang menjawab sangat setuju (SS) berjumlah 35 orang atau 58,7.

e. Item Pertanyaan Dukungan Dimensi Keteraturan;

Berikut hasil angket dari pertanyaan “keuangan publik Islam mampu menyelesaikan permasalahan makro ekonomi di Indonesia.”

Tabel 4.10 Hasil Angket Item Dukungan Dimensi Keteraturan

Y.3	Jlh	%	Jenis Kelamin				Usia								Tingkat Pendidikan			
			Lk	%	Pr	%	<30	%	30-40	%	40<	%	?	%	s2	%	s3	%
STS	2	4,35	2	7	0	0	0	0	1	5	1	5	0	0	1	3	1	17
TS	1	2,17	1	3	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	1	3	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	24	52,17	13	45	11	65	2	29	10	53	12	63	0	0	22	55	2	33
SS	19	41,3	13	45	6	35	5	71	7	37	6	32	1	100	16	40	3	50
Total	46	100	29	100	17	100	7	100	19	100	19	100	1	100	40	100	6	100
Total	46	100	46				46								46			
Y.3	Mengajar di prodi							Riwayat Pendidikan Formal										
	ES	%	HES	%	PS	%	D3PS	%	AS	%	Agama	%	IPS	%	IPS& Agama	%	Tidak Keduanya	%
STS	1	4	0	0	0	0	0	0	1	6	1	4	0	0	1	7	0	0
TS	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	14	52	7	50	14	56	7	70	11	65	12	50	4	67	7	47	1	100
SS	12	44	7	50	11	44	2	20	5	29	10	42	2	33	7	47	0	0
Total	27	100	14	100	25	100	10	100	17	100	24	100	6	100	15	100	1	100
Total															46			

Sumber Data: Hasil Penelitian, 2016 (Data Diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS) berjumlah 2 orang atau 4,35%. Jumlah responden yang menjawab tidak setuju (TS) berjumlah 1 orang atau 2,17%. Tidak ada responden yang Abstain (A). Jumlah responden yang menjawab setuju (S) berjumlah 24 orang atau 52,17%. Dan Jumlah responden yang menjawab sangat setuju (SS) berjumlah 19 orang atau 41,3%.

f. **Item Pertanyaan Dukungan Dimensi Realisasi**

Berikut hasil angket dari pertanyaan, “Suatu saat nanti keuangan publik Islam bisa saja diterapkan di Indonesia”.

Tabel 4.11 Hasil Angket Item Dukungan Dimensi Realisasi

Y.4	Jlh	%	Jenis Kelamin				Usia								Tingkat Pendidikan			
			Lk	%	Pr	%	<30	%	30-40	%	40<	%	?	%	s2	%	s3	%
STS	2	4,35	2	7	0	0	0	0	1	5	1	5	0	0	1	3	1	17
TS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1	2,17	1	3	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17
S	27	58,7	14	48	13	76	4	57	10	53	12	63	1	100	26	65	1	17
SS	16	34,78	12	41	4	24	2	29	8	42	6	32	0	0	13	33	3	50
Total	46	100	29	100	17	100	7	100	19	100	19	100	1	100	40	100	6	100
Total	46	100	46				46								46			
Y.4	Mengajar di prodi										Riwayat Pendidikan Formal							
	ES	%	HES	%	PS	%	D3PS	%	AS	%	Agama	%	IPS	%	IPS& Agama	%	Tidak Keduanya	%
STS	1	4	0	0	0	0	0	0	1	6	1	4	0	0	1	7	0	0
TS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1	4	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0
S	15	56	7	50	15	60	6	60	9	53	13	54	5	83	8	53	1	100
SS	10	37	7	50	9	36	4	40	7	41	10	42	1	17	5	33	0	0
Total	27	100	14	100	25	100	10	100	17	100	24	100	6	100	15	100	1	100
Total															46			

Sumber Data: Hasil Penelitian, 2016 (Data Diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS) berjumlah 2 orang atau 4,35%. Tidak ada responden yang menjawab tidak setuju (TS). Jumlah responden yang Abstain (A) berjumlah 1 orang atau 2,17%. Jumlah responden yang menjawab setuju (S) berjumlah 27 orang atau 58,7%. Dan Jumlah responden yang menjawab sangat setuju (SS) berjumlah 16 orang atau 34,78%.

g. Akumulatif Item Pertanyaan Dukungan

Tabel 4.12 Hasil Angket Dukungan Penerapan Keuangan Publik Islam

Skor Kumulatif	ΣY	Jlh	%	Jenis Kelamin				Usia								Tingkat Pendidikan			
				Lk	%	Pr	%	<30	%	30-40	%	40<	%	?	%	s2	%	s3	%
4- 7,2	STS	2	4,35	2	7	0	0	0	0	1	5	1	5	0	0	1	3	1	17
7,2-10,4	TS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,4-13,6	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,6-16,8	S	7	15,22	4	14	3	18	1	14	4	21	2	11	0	0	7	18	0	0
16,8-20,0	SS	37	80,43	23	79	14	82	6	86	14	74	16	84	1	100	32	80	5	83
	Total	46	100	29	100	17	100	7	100	19	100	19	100	1	100	40	100	6	100
	Total	46	100	46				46								46			
Skor Kumulatif	ΣY	Mengajar di prodi										Riwayat Pendidikan Formal							
		ES	%	HES	%	PS	%	D3PS	%	AS	%	Agama	%	IPS	%	IPS& Agama	%	Tidak Keduanya	%
4- 7,2	STS	1	4	0	0	0	0	0	0	1	6	1	4	0	0	1	7	0	0
7,2-10,4	TS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,4-13,6	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,6-16,8	S	3	11	2	14	4	16	3	30	2	12	3	13	2	33	1	7	1	100
16,8-20,0	SS	23	85	12	86	21	84	7	70	14	82	20	83	4	67	13	87	0	0
	Total	27	100	14	100	25	100	10	100	17	100	24	100	6	100	15	100	1	100
	Total											46							

Sumber Data: Hasil Penelitian, 2016 (Data Diolah)

Tabel di atas merupakan tabel kumulatif dari semua sub variabel yang ada untuk mewakili variabel dukungan. Data diperoleh dengan cara menjumlah seluruh skor yang di dapat per responden lalu mengelompokannya lagi dengan skala interval.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara kumulatif jumlah responden yang **sangat tidak setuju** (STS) berjumlah 2 orang atau **4,35%**. **Tidak ada responden tidak setuju** (TS) dan yang Abstain (A). Jumlah responden yang **setuju** (S) berjumlah 7 orang atau **15,22%**. Dan Jumlah responden yang menjawab sangat **setuju** (SS) berjumlah 37 orang atau **80,34%**. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas dosen mendukung penerapan keuangan publik Islam secara penuh.

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat dukungan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, hal ini bisa dilihat yang menjawab tidak sangat tidak setuju atas penerapan keuangan publik Islam hanya berasal dari laki-laki sejumlah 2 orang (7%) adapun perempuan memiliki angka sangat setuju yang lebih tinggi sejumlah 14 orang (82%) .

Berdasarkan Usia, angka relatif sama. Namun dapat disimpulkan yang berusia di bawah 30 tahun cenderung memiliki angka dukungan yang paling tinggi, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya yang tidak mendukung penerapan keuangan publik Islam dan memiliki angka sangat setuju sejumlah 6 orang (86%).

Berdasarkan tingkat pendidikan juga menunjukkan angka yang relatif sama. Yang telah menempuh pendidikan s3 cenderung memiliki

persentase ketidak setujuan tinggi hingga 17% (1 orang). Hal ini dipengaruhi jumlah responden S3 yang berjumlah kecil (6 orang) sehingga satu angket sangat mempengaruhi.

Berdasarkan riwayat pendidikan formal, ketidak setujuan justru berasal yang memiliki riwayat pendidikan agama saja dan agama beserta IPS sekaligus. Namun keduanya memiliki tingkat sangat setuju yang paling tinggi (83% dan 87%).

Meskipun masih terdapat responden yang tidak mendukung penerapan keuangan publik Islam, jumlahnya sangat kecil yakni hanya sebesar 4,35%. Maka dari pemaparan di atas, responden yang tidak mendukung penerapan keuangan publik Islam sebagai sapaket sistem ekonomi memiliki latar belakang laki-laki, berusia di atas 30 tahun, memiliki pendidikan agama, baik s2 maupun s3. Mengingat latar belakang pendidikan yang tinggi dan juga memiliki latar belakang agama namun memiliki persepsi yang lain dari kebanyakan, tentu mereka memiliki alasan yang mendasari persepsi mereka tersebut. Penelitian atau pendekatan lebih lanjut dapat dilakukan kepada mereka untuk mengupas maksud dari ketidak sepakatan dalam menerapkan keuangan publik Islam sebagai satu kesatuan tatanan keuangan publik di Indonesia.

Angka Dukungan Penerapan keuangan publik Islam yang sangat tinggi ini sebesar 15,22 % setuju dan 80,43% sangat setuju atau jika dijumlahkan menjadi 95,65% dapat menjadi kesimpulan bahwa Dosen FSEI IAIN Antasari mendukung jika keuangan publik Islam diterapkan di

Indonesia. Hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan berbagai pihak untuk turut mendukung dan mengupayakan realisasi penerapan keuangan publik Islam di Indonesia dengan berbagai cara yang tidak dapat dibatasi oleh penelitian ini.

Melihat tingginya angka dukungan terhadap penerapan keuangan publik Islam ini berarti menguatkan penelitian sebelumnya terkait penerapan syariah secara umum yang menghasilkan penerapan syariat bernilai tinggi.

4. Data Untuk Uji Korelasi

Pada pengujian yang ini, hanya terdapat 44 angket yang bisa dilanjutkan karena 2 angket lainnya tidak lengkap dalam mengisi variabel kedua. Oleh sebab itu masing-masing variabel di uji ulang akan validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya jika semua memenuhi syarat, variabel wawasan dikonversikan ke bentuk skala dari skala indikator menjadi skala likert agar kedua variabel memiliki skala yang sama¹.

Item-item pertanyaan pada variabel wawasan ini, tidak bersifat menguji wawasan responden terhadap keuangan publik Islam, namun hanya bersifat mengungkap persepsi mereka akan pemahaman mereka sendiri tentang keuangan publik Islam. Hal ini dilakukan karena keuangan publik Islam merupakan pembahasan yang cukup tinggi dalam *ṣaqofah* Islam serta merupakan cabang syariat yang membuka peluang adanya ragam pendapat

¹ Prof. Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm.191.

pemahaman (*fiqh*) sehingga akan menyulitkan untuk mengukur kebenarannya terlebih jika angket bersifat tertutup.

a. Hasil Angket Variabel Wawasan

1) Deskriptif

Tabel 4.13 Hasil Angket Variabel Wawasan

Jawaban	<i>Baitul Mal</i>	Mata Uang	<i>Aturan Khas</i>	Zakat	<i>Kharaj</i>	<i>Jizyah</i>	<i>Usyur</i>	<i>Ganimah</i>	<i>Khums</i>	<i>Rikaz</i>	<i>Kafarat</i>	Wakaf	<i>Nawa'ib</i>	<i>Daribah</i>	<i>Amwal Faḍla</i>
0	3	4	5	0	5	4	14	4	17	6	5	1	21	18	23
1	41	40	39	5	11	12	10	11	6	13	9	7	13	10	9
2	/			39	28	28	20	29	21	25	30	36	10	16	12
Tot	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

0: Tidak Tahu | 1 : Tahu | 2 : Tahu beserta Fiqhnya (dalam konteks keuangan publik)

Sumber Data : Hasil Penelitian, 2016 (Data Diolah)

Tabel di atas menunjukkan instrumen yang kurang familiar di antara dosen adalah *Amwal Faḍla*, *Nawa'ib*, *Daribah*, dan *Khums*. Adapun yang sangat familiar di antara dosen adalah Zakat dan Wakaf.

2) Konversi Skala Likert

Tabel 4.14 Konversi Variabel Wawasan Likert

IK	X	Jlh	%	Mengajar di prodi									
				ES	%	HES	%	PS	%	D3PS	%	AS	%
0-6	Kurang Berwawasan	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7-12	Cukup Berwawasan	8	18,18	4	16	1	7	3	12	2	20	1	6
13-18	Berwawasan	7	15,91	4	16	4	29	1	4	1	10	4	24
19-24	Berwawasan Baik	11	25,00	5	20	2	14	9	36	3	30	4	24
25-30	Berwawasan sangat Baik	18	40,91	12	48	7	50	12	48	4	40	8	47
	Total	44	100	25	100	14	100	25	100	10	100	17	100
	Total	44	920										
X	Tingkat Pendidikan				Riwayat Pendidikan Formal								
	s2	%	s3	%	Agama	%	IPS	%	IPS& Agama	%	Tidak Keduanya	%	
Kurang Berwawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cukup Berwawasan	7	18	1	20	3	13	3	50	1	7	1	100	
Berwawasan	5	13	2	40	5	22	1	17	1	7	0	0	
Berwawasan Baik	10	26	1	20	5	22	2	33	4	29	0	0	
Berwawasan sangat Baik	17	44	1	20	10	43	0	0	8	57	0	0	
Total	39	100	5	100	23	100	6	100	14	100	1	100	
Total	44				44								

IK : Interval Kumulatif

Sumber Data : Hasil Penelitian, 2016 (Data Diolah)

Data di atas menunjukkan **18,18%** dosen cukup berwawasan; **15,91%** Berwawasan; **25%** berwawasan baik; dan **40,91%** berwawasan sangat baik terhadap keuangan publik Islam.

Berdasarkan prodi mengajar dan tingkat pendidikan secara umum terlihat tingkat wawasan dosen terdistribusi merata di setiap jenjang. Berdasarkan pada riwayat pendidikan formal, dosen yang memiliki riwayat pendidikan formal agama atau keduanya cenderung memiliki

wawasan yang lebih tinggi daripada yang tidak memiliki riwayat pendidikan formal keagamaan.

b. Uji Validitas

1) Variabel Dukungan

Valid tidaknya butir item pertanyaan variabel dapat dilihat dengan mengkonsultasikan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dari tabel r (dapat dilihat di lampiran), untuk $df = n - 2$, atau dalam penelitian ini $df = 44 - 2 = 42$ dengan tingkat signifikan 10%, diperoleh angka $r_{tabel} = 0,2512$.

Berikut ini hasil uji validitas penelitian dengan menggunakan IBM SPSS STATISTIC 22 pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Item Dukungan II

Item Pertanyaan	r_{hitung}	$r_{tabel (0,05)}$	Keterangan
Ekonomi Islam	0,873	0,2512	Valid
Keadilan	0,899	0,2512	Valid
Keteraturan	0,855	0,2512	Valid
Realisasi	0,828	0,2512	Valid

Sumber: hasil penelitian 2016 (Data diolah)

Dari hasil uji validitas di atas bahwa semua rangka r_{hitung} berada di atas r_{tabel} yaitu 0,2512 yang menunjukkan bahwa semua butir item valid dengan tingkat kepercayaan 95%.

2) Variabel Wawasan

Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Item Wawasan

Item Pertanyaan	r_{hitung}	$r_{tabel (0,05)}$	Keterangan
Simpulan Umum	0,562	0,2512	Valid
Instrumen	0,952	0,2512	Valid

Sumber: hasil penelitian 2016 (Data diolah)

Dari hasil uji validitas di atas bahwa semua rangka r_{hitung} berada di atas r_{tabel} yaitu 0,2512 yang menunjukkan bahwa semua butir item valid dengan tingkat kepercayaan 95%.

Pernyataan ini dibangun dari sub variabel yang juga telah valid sebagai berikut:

(a) Sub Variabel Simpulan Umum Keuangan Publik Islam

Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas Item Simpulan Umum Keuangan Publik Islam

Item Pertanyaan	r_{hitung}	$r_{tabel (0,05)}$	Keterangan
Baitul Mal	0,496	0,2512	Valid
Mata Uang	0,671	0,2512	Valid
Adanya Kaidah pengelolaan	0,821	0,2512	Valid

Sumber: hasil penelitian 2016 (Data diolah)

Dari hasil uji validitas di atas bahwa semua rangka r_{hitung} berada di atas r_{tabel} yaitu 0,2512 yang menunjukkan bahwa semua butir item valid dengan tingkat kepercayaan 95%.

(b) Sub Variabel Instrumen Keuangan Publik Islam

Tabel 4.18 Hasil Uji Validitas Item Instrumen Keuangan Publik Islam

Item Pertanyaan	r_{hitung}	$r_{tabel (0,05)}$	Keterangan
Zakat	0,549	0,2512	Valid
Kharaj	0,741	0,2512	Valid
Jizyah	0,847	0,2512	Valid
'Usyur	0,861	0,2512	Valid
Ganimah	0,844	0,2512	Valid
Khumus	0,836	0,2512	Valid
Rikaz	0,837	0,2512	Valid
Kafarat	0,665	0,2512	Valid
Wakaf	0,676	0,2512	Valid
Nawa'ib	0,552	0,2512	Valid
Daribah	0,694	0,2512	Valid
Amwal Fadla	0,619	0,2512	Valid

Sumber: hasil penelitian 2016 (Data diolah)

Dari hasil uji validitas di atas bahwa semua rangka r_{hitung} berada di atas r_{tabel} yaitu 0,2512 yang menunjukkan bahwa semua butir item valid dengan tingkat kepercayaan 95%.

c. Uji Reliabilitas

1) Variabel Dukungan

Uji realibilitas pada masing-masing variabel diperoleh dengan mengkonsultasikan nilai r_{alpha} dengan r_{tabel} , apabila $r_{alpha} > r_{tabel}$, maka dikatakan reliabel². Dalam hal ini taraf signifikasinya 5% dengan n 46 sehingga $df = n - 2$, $df = 46 - 2 = 44$ maka didapat $r_{tabel} = 0,2512$.

Berikut hasil uji realibilitas penelitian ini dengan menggunakan IBM SPSS STATISTIC 22 (dapat dilihat di lampiran) pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.19 Hasil Uji Reliabilitas Item Dukungan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,886	4

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Ekonomi Islam	13,05	3,998	,761	,851
Keadilan	13,20	4,027	,813	,830
Keteraturan	13,41	4,108	,732	,862
Realisasi	13,45	4,440	,706	,871

Sumber: hasil penelitian 2016 (Data diolah)

²Joko Widiyanto, *SPSS for Windows*, (Badan Penerbit FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), dipopulerkan oleh Sahid Raharjo dalam Konsistensi.com dan SPSSIndonesia.com.

Dari uji realibilitas di atas dapat diketahui bahwa semua angka r *alpha cronbach* adalah 0,886 yang artinya $r_{\text{alpha}} > r_{\text{tabel}}$; $0,886 > 0,2512$ yang menunjukkan semua reliabel.

2) Variabel Wawasan

Tabel 4.20 Hasil Uji Reliabilitas Wawasan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,310	2

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Simpulan Umum	1,3333	,279	,282	.
Instrumen	,9091	,038	,282	.

Sumber: hasil penelitian 2016 (Data diolah)

Dari uji realibilitas di atas dapat diketahui bahwa semua angka r *alpha cronbach* adalah 0,31 yang artinya $r_{\text{alpha}} > r_{\text{tabel}}$; $0,31 > 0,2512$ yang menunjukkan semua reliabel.

Pernyataan ini dibangun dari sub variabel yang juga telah valid sebagai berikut:

a) Sub Variabel Simpulan Umum Keuangan Publik Islam

Tabel 4.21 Hasil Uji Reliabilitas Item Simpulan Umum Keuangan Publik Islam
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,394	3

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Baitul Mal	1,80	,260	,069	,554
Mata Uang	1,82	,199	,228	,309
Adanya Kaidah pengelolaan	1,84	,137	,432	-,185 ^a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

Sumber: hasil penelitian 2016 (Data diolah)

Dari uji realibilitas di atas dapat diketahui bahwa angka *r alpha cronbach* adalah 0,394 yang artinya $r_{\alpha} > r_{\text{tabel}}$; $0,394 > 0,2512$ yang menunjukkan reliabel secara keseluruhan. Namun ada satu item yang tidak reliabel yakni adanya kaidah pengelolaan yang bernilai -0,185.

b) Sub Variabel Instrumen Keuangan Publik Islam

Tabel 4.22 Hasil Uji Reliabilitas Item Instrumen Keuangan Publik Islam
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,913	12

Item-Total Statistics

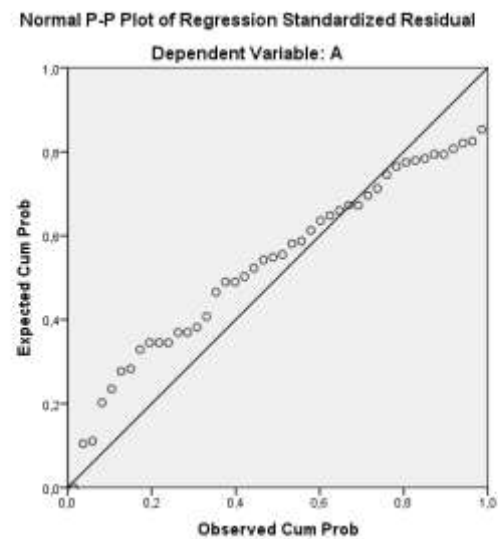
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Zakat	14,11	38,010	,512	,914
Kharaj	14,48	34,069	,685	,905
Jizyah	14,45	33,463	,813	,900
'Usyur	14,86	31,330	,817	,898
Ganimah	14,43	33,507	,809	,900
Khumus	14,91	31,108	,782	,900
Rikaz	14,57	32,949	,797	,899
Kafarat	14,43	34,763	,597	,908
Wakaf	14,20	36,399	,633	,909
Nawa'ib	15,25	35,122	,454	,916
Ḍaribah	15,05	33,114	,610	,909
Amwal Faḍla	15,25	34,099	,523	,913

Sumber: hasil penelitian 2016 (Data diolah)

Dari uji realibilitas di atas dapat diketahui bahwa semua angka *r alpha cronbach* adalah 0,913 yang artinya $r_{\alpha} > r_{\text{tabel}}$; $0,913 > 0,2512$ yang menunjukkan semua reliabel.

d. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan diagram *normal P-P Plot regression standardized* dan Uji shapiro-wilk yang dikarenakan responden berjumlah kurang dari 50 dengan bantuan IBM SPSS STATISTIC 22 yang dihasilkan gambar sebagai berikut:

Gambar 4.3 Grafik P-P Plot Uji Normalitas

Sumber Data: Hasil Penelitian, 2016 (Data diolah)

Tabel 4.23 Uji Normalitas

Tests of Normality^{b,c,d,e,f,g}

	X	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Y	7	,260	2	.			
	8	,192	4	.	,971	4	,850
	14	,260	2	.			
	15	,260	2	.			
	17	,175	3	.	1,000	3	1,000
	18	,260	2	.			
	21	,300	5	,161	,833	5	,146
	22	,260	2	.			
	23	,298	4	.	,849	4	,224
	24	,260	2	.			
	25	,175	3	.	1,000	3	1,000
	27	,235	7	,200*	,856	7	,139

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

b. Y is constant when X = 9. It has been omitted.

c. Y is constant when X = 11. It has been omitted.

d. Y is constant when X = 12. It has been omitted.

e. Y is constant when X = 13. It has been omitted.

f. Y is constant when X = 16. It has been omitted.

g. Y is constant when X = 19. It has been omitted.

Sumber Data: Hasil Penelitian, 2016 (Data Diolah)

Dari gambar P-P Plot menunjukkan data terdistribusi sekitar garis serta searah dengan garis sehingga sulit menyimpulkan normalitas hanya dengan gambar saja. Jika dilihat tabel Shapiro-Wilk, meski ada beberapa yang bernilai sig. > 0,05, namun diketahui ada 6 item yang tidak terdistribusi normal atau sig. < 0,05. Sehingga disimpulkan data tidak terdistribusi normal. Uji asumsi klasik selanjutnya pun tidak dapat dilanjutkan. Begitu pula uji regresi tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat. Namun masih dapat melanjutkan uji korelasi dengan menggunakan koefisien spearman, yakni di saat data tidak terdistribusi secara normal.

B. Pengujian Hipotesis Korelasi

Sebagaimana Bab I hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Tingkat wawasan keuangan publik Islam tidak berhubungan terhadap dukungan penerapan keuangan publik Islam.

H_1 = Tingkat wawasan keuangan publik Islam berhubungan terhadap dukungan penerapan keuangan publik Islam.

Tabel 4.24 Hasil Uji Korelasi
Correlations

			L.X	ΣY
Spearman's rho	X	Correlation Coefficient	1,000	,165
		Sig. (2-tailed)	.	,284
		N	44	44
	Y	Correlation Coefficient	,165	1,000
		Sig. (2-tailed)	,284	.
		N	44	44

Sumber Data: Hasil Penelitian, 2016 (Data Diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. lebih besar dari pada pada 0,05 yakni $\text{sig.}0,284 > 0,05$ yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara wawasan dengan dukungan. Berdasarkan uji korelasi di atas maka H_0 diterima yakni tingkat wawasan keuangan publik Islam berhubungan positif terhadap dukungan penerapan keuangan publik Islam.

C. Pembahasan

Dari penelitian diatas, dapat diketahui responden memiliki tingkat wawasan keuangan publik Islam yang beragam dan cukup merata di setiap tingkatan. Hal ini disebabkan mereka memiliki latar belakang pendidikan dan spesialisasi yang berbeda-beda. Pembahasan mengenai keuangan publik Islam dalam ilmu syariat termasuk pembahasan pendalaman dan cabang, oleh sebab itu tidak terlalu mengetahuinya bukan merupakan permasalahan besar.

Data menunjukkan, responden yang berwawasan sangat baik dalam pembahasan ini memiliki angka yang terbilang tinggi sebesar 40,91%. Hal ini disebabkan responden memiliki kesamaan ciri-ciri yakni berpendidikan tinggi yang notabene memiliki kapabilitas ilmu agama dan/atau ilmu ekonomi yang luas serta pembahasan yang beririsan antara ekonomi, fiqh Islam, dan hukum.

Penelitian ini menyimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara wawasan dosen tentang keuangan publik Islam dengan dukungan mereka

terhadapnya. Jadi meski memiliki wawasan yang tinggi, responden belum tentu memiliki kecenderungan untuk mendukung atau meski memiliki wawasan yang kurang, responden belum tentu memiliki kecenderungan untuk tidak mendukung penerapan keuangan publik.

Data menunjukkan tingginya dukungan penerapan keuangan publik Islam padahal tidak ada korelasi signifikan antara wawasan dan dukungan. Hal ini sangat logis terjadi mengingat seluruh responden beragama Islam yang mana akidah mereka memang menuntut untuk tidak memilih-milih syariat Islam untuk diyakini dan diadopsi sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:208.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”³

Selain karena aqidah, Islam memang memenuhi berbagai macam persyaratan sebagai sumber hukum untuk mengatur kehidupan manusia seperti keadilan, kepastian, dan keteraturan. Instrumen-instrumennya pun memiliki *khazanah* keuangan publik yang terbilang cukup komplit dan detail, serta memiliki metode ijtihad yang dapat memastikannya mengikuti perkembangan zaman sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat bernegara akan tatanan keuangan publik.

³al Qur'an Word 2.9.

Adapun yang tidak mendukung penerapan keuangan publik mengingat latar belakangnya yang memiliki kompetensi, tentu mereka memiliki argumen untuk tidak mendukung penerapan keuangan publik Islam. Ada beberapa kemungkinan alasan yang membuat tidak mendukung, antarlain,

1. Aturan keuangan publik yang ada di Indonesia sudah dianggap tidak bermasalah atau sudah Islami sehingga tidak perlu di ganti.
2. Tidak perlu menerapkan seluruh peraturan keuangan publik Islam karena Indonesia berada pada kondisi dan zaman yang berbeda sehingga beberapa instrumen keuangan publik Islam dianggap kurang sesuai sebagaimana kaidah لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ yang artinya tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat.
3. Keuangan publik dianggap perkara di luar aturan agama sehingga hal ini diserahkan kepada manusia kecuali ada dalil yang khusus mengaturnya sebagaimana kaidah الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا yang artinya hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
4. Penerapan syariat secara formal dianggap menimbulkan bahaya (*mudarat*) berupa ketidak stabilan politik negara untuk mempertahankan keutuhan negara sementara metode atau cara penerapan yang halus tanpa menimbulkan *mudarat* tersebut belum ditemukan atau dapat dilakukan.

Sebagaimana kaidah *درأ المفسد مقدم على جلب المصالح* yang artinya

menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Namun sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui konsep keuangan publik yang seharusnya menurut dosen.